



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2014

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
ACEH**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma pelayanan publik yang telah mengarah pada prinsip profesionalitas, transparansi, partisipatif dan akuntabel merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintah dalam segala aspek terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki wajib dilakukan oleh instansi dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang melaporkan hal-hal penting yang menjadi lingkup tanggung jawab instansi, mencakup capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategis di tingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh disusun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

LAKIP merupakan sarana Akuntabilitas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mengukur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan dinas dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran

kerja sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2012-2017, dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 adalah :

- a. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta hasil evaluasi;
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- d. Sebagai perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui DPA APBA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berkedudukan dibawah Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah. Dalam mengemban tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupaya melestarikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan khasanah kebudayaan dan warisan budaya di daerah Provinsi Aceh.

Demi mencapai maksud dan tujuan tersebut, berbagai Program/Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami serta potensinya sebagai sumber daya industri yang dapat mendorong ekonomi masyarakat.

Adapun tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara Islami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota;
5. Pembinaan terhadap usaha Pariwisata di Provinsi Aceh;
6. Pemberian Rekomendasi perizinan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok di atas maka Pemerintah memberikan beberapa kewenangan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang Kebudayaan dan Pariwisata
2. Pelatihan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Penyelenggaraan Adat, Nilai Budaya, Bahasa dan Seni.
4. Pengembangan Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.
5. Pengembangan Destinasi, Pemasaran, Usaha Pariwisata.

C. ASPEK STRATEGIS

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (*RPJMA*) Periode Tahun 2012-2017, dimana rencana pengembangan pembangunan kebudayaan dan pariwisata memprioritaskan Dinul Islam, Adat dan Budaya.

Aceh memiliki 800 obyek wisata, termasuk didalamnya obyek wisata alam, wisata budaya serta wisata minat khusus yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Potensi tersebut telah menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Aceh. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh terus meningkat rata-rata 18,5 % pertahun, demikian pula kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh.

Struktur PDRB Aceh baik dengan migas maupun tanpa migas menunjukkan bahwa dua sektor yang merupakan leading sektor bagi perekonomian Aceh pada triwulan III-2014 masih berada pada sektor pertanian (28,38 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (18,27 persen) dari sisi lapangan usaha.

Adapun yang menjadi isu strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah sebagai berikut:

A. Isu strategis Bidang Kebudayaan

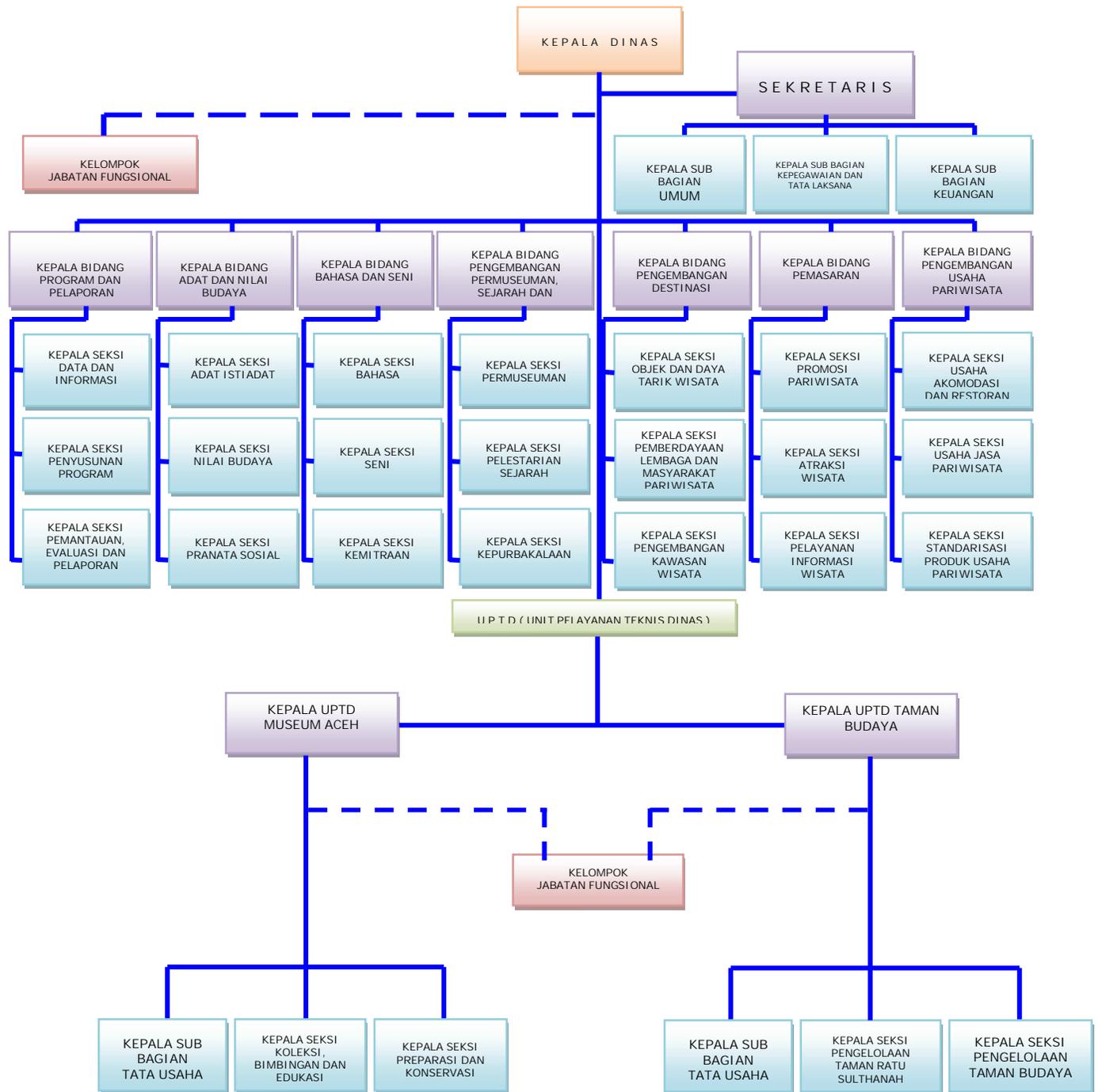
1. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan bidang budaya;
2. Perilaku budaya masyarakat Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan nilai, adat istiadat & budaya Aceh yang bersifat Islami;
3. Lemahnya perhatian Pemerintah & masyarakat dalam pelestarian khazanah seni tradisional, sastra budaya & patenisasi seni budaya Aceh;
4. Lemahnya penataan, pemeliharaan, pemanfaatan & pendataan situs & cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi;
5. Belum maksimalnya pemanfaatan aset budaya secara optimal;
6. Rendahnya SDM dalam pengelolaan peninggalan sejarah & budaya lokal;
7. Rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi Museum Aceh

B. Isu strategis Bidang Pariwisata

1. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan & evaluasi;
2. Belum optimalnya pembangunan kawasan wisata;
3. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana;
4. Kurangnya promosi kepariwisataan secara regional, nasional & internasional;
5. Belum optimal pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi & informasi;
6. Belum tertatanya objek-objek wisata: *alam, agro, budaya & minat khusus*;
7. Pengelolaan *DTW* belum optimal & berdampak pada PAD;
8. Kurangnya penyelenggaraan event promosi budaya & pariwisata;
9. Pemanfaatan aset budaya daerah: *Taman Budaya, Taman Sulthanah Safiatuddin & Museum Aceh*;
10. Belum optimalnya pemanfaatan objek wisata sejarah.
11. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Qanun No. 5 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang terdiri dari: 1 (satu) orang eselon II/a, 10 sepuluh orang eselon III/a dan 30 (tiga puluh) eselon IV/a , dengan Struktur Organisasi sebagai berikut ;



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, memiliki kewenang sesuai bidang dan seksi (jumlah Bidang/Bagian 8, serta jumlah UPTD 2) untuk melakukan peningkatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Aceh, dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu :

1. Sekretaris mempunyai tugas yaitu :
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
 - Membinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - Pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas yaitu :
 - Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN;
 - Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata;
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
 - Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Adat dan Nilai Budaya mempunyai tugas yaitu :
 - Pelaksanaan pengembangan adat dan nilai budaya daerah;
 - Pelaksanaan pelestarian adat dan nilai budaya daerah;
 - Pembinaan lingkungan adat dan nilai budaya daerah;
 - Pembinaan pranata adat, budaya dan sosial;

- Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi nilai adat dan budaya;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang adat dan nilai budaya; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Bahasa dan Seni mempunyai tugas yaitu :
- Pelaksanaan pengembangan, penelitian dan pelestarian system bahasa dan kesenian daerah;
 - Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi bahasa dan kesenian daerah;
 - Pelaksanaan pengembangan bahasa, sastra daerah,
 - Asing dan kesenian;
 - Pelaksanaan fasilitas bantuan kepada organisasi atau lembaga
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bahasa dan seni; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengembangan Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas yaitu :
- Pelaksanaan pengembangan permuseuman, sejarah dan keurbakalaan;
 - Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi benda-benda cagar budaya, sejarah dan tokoh pelaku sejarah;
 - Pelaksanaan pemeliharaan dan perlindungan peninggalan sejarah, situs dan pemugaran benda-benda cagar budaya;
 - Pelestarian benda-benda warisan budaya dan alam;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya.
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas yaitu :
 - Pelaksanaan pengembangan dan pengaturan objek wisata, taman rekreasi dan hiburan umum;
 - Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan rekomendasi perizinan di bidang pengusaha objek wisata, taman rekreasi dan hiburan umum;
 - Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga, masyarakat dan industry pariwisata;
 - Pelaksanaan pengembangan kawasan dan wilayah pariwisata;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pengembangan destinasi pariwisata
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Bidang Pemasaran mempunyai tugas yaitu :
 - Pelaksanaan analisa pasar, promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
 - Penyelenggaraan kegiatan atraksi wisata daerah;
 - Pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi wisata;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemasaran pariwisata, dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai tugas yaitu :
 - Pelaksanaan dan pengembangan usaha, akomodasi dan restoran;
 - Pelaksanaan pembinaan usaha jasa pariwisata;
 - Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata, akomodasi, restoran, usaha jasa dan standarisasi produk usaha pariwisata;
 - Pemberian rekomendasi perizinan usaha pariwisata, akomodasi, restoran, usaha jasa pariwisata dan standarisasi produk usaha pariwisata;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan usaha pariwisata; dan

- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Disbudpar Aceh sebagai berikut :

9. UPTD Taman Budaya mempunyai tugas yaitu :

- Penyusunan perencanaan dan perumusan kegiatan seni dan budaya;
- Pengelolaan taman budaya;
- Pelaksanaan pengolahan dan terhadap karya seni dan budaya;
- Penyelenggaraan pagelaran, pertunjukan dan pameran seni dan budaya;
- Pelaksanaan latihan, ceramah, seminar, sarasehan seni dan budaya;
- Pengelolaan perpustakaan, publikasi, seni dan budaya;
- Pelaksanaan rekaman audio visual dan dokumentasi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTD.

10. UPTD Museum Aceh mempunyai tugas yaitu :

- Penyusunan program perencanaan di bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan benda-benda yang bernilai.
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- Pelaksanaan penelitian, penerbitan, dan penyeberluasan hasil penelitian benda-benda warisan budaya dan ilmiah;
- Pelaksanaan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya sebagai sumber primer pengetahuan sejarah dan budaya;
- Pelaksanaan penyajian, publikasi benda-benda warisan budaya.
- Pemberian bimbingan edukasi dan ilmiah yang bersifat rekreatif;
- Pelaksanaan pameran benda-benda warisan budaya
- Pelaksanaan pelayanan informasi budaya.

Sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebanyak 291 orang dengan rincian sejumlah 226 orang berstatus Pegawai Negari Sipil (PNS) dan 55 orang merupakan Tenaga Kontrak serta Bakti 10 orang.

Secara lebih terperinci berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, golongan ruang dan jabatan struktural dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 1.1**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Pendidikan**

| No | Kualifikasi SDM | Jenjang Pendidikan | | | | | | | | | JLH |
|----|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----|------------|
| | | SD | SLTP | SLTA | D-I | D-II | D-III | S.1 | S.2 | S.3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PNS | 5 | 6 | 75 | - | - | 18 | 107 | 15 | - | 226 |
| 2 | Tenaga Kontrak | 1 | 3 | 45 | - | - | 3 | 3 | - | - | 55 |
| 3 | Tenaga Bakti | - | - | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 10 |
| | Jumlah | 6 | 9 | 124 | - | - | 23 | 114 | 15 | | 291 |

Tabel: 1.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Golongan Ruang**

| No | Kualifikasi SDM | Golongan Pegawai | | | | Jumlah |
|----|-----------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PNS | 6 | 57 | 148 | 15 | 226 |
| 2 | Tenaga Kontrak | 2 | 50 | 3 | - | 55 |
| 3 | Tenaga Bakti | - | 6 | 4 | - | 10 |
| | Jumlah | 8 | 113 | 155 | 15 | 291 |

Tabel: 1.3**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Jabatan Struktural**

| No | Kualifikasi SDM | Eselonering | | | | Jumlah |
|----|--------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kepala Dinas | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Sekretaris/Kepala Bidang | - | - | 8 | - | 8 |
| 3 | Kepala UPTD | - | - | 2 | - | 2 |
| 4 | Kasubbag/Kasi | - | - | - | 24 | 24 |
| 5 | Kasubbag/Kasi UPTD | - | - | - | 6 | 6 |
| | Jumlah | 0 | 1 | 10 | 30 | 41 |

Sarana pendukung lainnya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupa :

Tabel : 1.4
Kondisi Sarana dan Prasarana

| No | Sarana dan Prasarana | Volume | Baik | Rusak | Rusak Berat | Ket |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------------|-----|
| 1. | Mobil Dinas | 9 (Sembilan) unit | 9 | | | |
| 2. | Sepeda Motor | 8 (Delapan) unit | 8 | | | |
| 3. | Komputer dan Printer | 50 (Lima Puluh) unit | 49 | 1 | | |
| 4. | Mesin Tik Manual | 5 (lima) unit | 3 | 2 | | |
| 5. | Meja, Kursi | 304 (tiga ratus empat) Unit | 230 | 74 | | |
| 6. | Filling Kabinet | 21 (dua puluh satu) Unit | 9 | 12 | | |
| 7. | Brangkas | 2 (dua) Unit | 2 | | | |
| 8. | Handy Talky (HT) | 6 (enam) Unit | 6 | | | |
| 9. | Tustel | 9 (Sembilan) Unit | 9 | | | |
| 10. | AC | 69 (enam puluh sembilan) unit | 64 | 5 | | |
| 11. | Kipas Angin | 5 (lima) unit | 5 | | | |
| 12. | Laptop | 31 (Tiga puluh satu) unit | 29 | 2 | | |
| 13. | Mesin Photo Copy | 1 (satu) unit | 1 | | | |
| 14. | Mesin Potong Rumput | 9 (sembilan) unit | 9 | | | |
| 15. | Vacum Cleaner (Mesin Isap Abu) | 1 (satu) unit | 1 | | | |
| 16. | Mesin Air | 4 (empat) unit | 4 | | | |
| 17. | Sepeda | 2 (dua) unit | 2 | | | |
| 18. | Kalkulator | 15 (lima belas) Unit | 15 | | | |
| 19. | Handy Cam | 5 (Lima) Unit | 5 | | | |
| 20. | Lemari | 15 (lima belas) Unit | 14 | 1 | | |
| 21. | Genset | 1 (Satu) Unit | 1 | | | |
| 22. | Lemari Es (Kulkas) | 3 (tiga) Unit | 3 | | | |
| 23. | TV | 8 (Delapan) Unit | 7 | 1 | | |
| 24. | Infocus | 8 (Delapan) Unit | 7 | 1 | | |

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh selama tahun 2014. Capaian kinerja (Performance result) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Oleh karenanya sistematika penyajian LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2014, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, uraian singkat mandat yang dibebankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (gambaran umum tupoksi), struktur organisasi, serta sistematika penyajian.

Bab II, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan mengenai muatan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk periode 2012-2017, indikator kinerja utama (IKU), dan penetapan kinerja untuk tahun 2014.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menyangkut pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas dengan cara menyajikan uraian hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama, pengukuran capaian kinerja tahun 2014, serta akuntabilitas keuangan. Mengevaluasi mengenai keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Bab IV – Penutup, mengemukakan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai perpanjangan tugas pemerintah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berusaha melaksanakan segala tugas yang diemban dengan sebaik mungkin, melalui perencanaan yang terprogram dan mengakomodir harapan semua pihak terutama masyarakat tani.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2012 s/d 2017, pada hakikatnya memuat kebutuhan dari visi dan misi Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh serta visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Visi dan Misi tersebut dituangkan pada tujuan kegiatan, rencana capaian kegiatan dan hasil kegiatan yang meliputi berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan serta skala prioritas program maupun kebijakan.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga memperhatikan prinsip responsibilitas, sinergis dan akuntabel dengan mengacu kepada dokumen resmi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berisikan tentang kebijakan pengambilan keputusan dan perencanaan pengembangan pembangunan. Program-program yang ditawarkan didalamnya, berisikan tentang harapan –harapan masyarakat khususnya dan juga program-program pembangunan daerah umumnya (Provinsi, Kabupaten dan Nasional).

1. Visi dan Misi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah menetapkan Visi dan Misi untuk dapat diselaraskan dengan peluang, potensi dan tantangan yang akan dihadapi, sekaligus sebagai tolok ukur capaian kinerja dibandingkan dengan Renstra yang telah disusun sebagai berikut;

V I S I

*“ACEH DESTINASI WISATA SYARIAH UNGGULAN
DI ASIA TENGGARA 2017”.*

MISI

- Melakukan upaya pemeliharaan dan penguatan nilai-nilai budaya menuju penerapan Dinul Islam.
- Melestarikan, mendayagunakan dan memanfaatkan wisata budaya, nilai-nilai syariat dan kawasan wisata unggulan.
- Membangun jiwa kewirausahaan, kompetensi, dan kerjasama terpadu antar pelaku budaya dan usaha pariwisata..
- Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengembangan budaya dan pariwisata.
- Menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai event, serta mempromosikan kegiatan kebudayaan dan pariwisata.

Rumusan Visi - Misi

- Terpelihara nilai-nilai budaya dan dinul Islam dalam kehidupan masyarakat
- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai syariah dan kawasan wisata alam unggulan
- Tersedia dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terjalannya kerjasama para pemangku kepentingan, serta terbangunnya jiwa kewirausahaan bidang kebudayaan dan pariwisata
- Terbangunnya kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat lingkungan situs budaya, budayawan dan seniman, komunitas dan tokoh adat, pelaku industri pariwisata dan masyarakat lingkungan objek wisata
- Terselenggara dan ikut serta pada berbagai event, serta promosi potensi budaya dan kepariwisataan

2. Sasaran dan Target

Sasaran program pada tahun 2014 atau Tahun ke 3 Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2012-2017 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas, profesionalitas dan produktivitas sumber daya manusia dan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata

- Meningkatnya jalinan kerjasama dan sinergisitas antar para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata
- Terbangunnya jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif bidang kebudayaan dan pariwisata
- Terlaksananya standarisasi dan sertifikasi pelaku dan produk budaya dan pariwisata

Target kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yang terangkum pada Renstra 2012 s/d 2017 sebagai berikut :

1. Terpeliharanya dan teramalkannya nilai-nilai budaya dan Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai Syariat Islam dan tersedianya kawasan wisata alam unggulan.
3. Tersedia dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terjalinnya kerjasama para pemangku kepentingan, serta terbangunnya jiwa kemandirian berusaha bidang kebudayaan dan pariwisata.
4. Terbangunnya kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan situs budaya, peningkatan wawasan pengetahuan para budayawan dan seniman, komunitas dan tokoh adat, meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata dan masyarakat lingkungan objek wisata.
5. Terselenggara dan ikut serta pada berbagai event, serta promosi potensi budaya dan wisata.

3. Strategi, Kebijakan dan Program

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh memiliki strategi, kebijakan dan program sebagai berikut;

Strategi yang ditetapkan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata
2. Peningkatan kerja sama antar para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata
3. Membangun jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif bidang kebudayaan dan pariwisata

4. Melakukan standarisasi dan sertifikasi pelaku dan produk budaya dan pariwisata

Kebijakan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh:

1. Pengembangan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata
2. Melakukan upaya peningkatan jalinan kerjasama dan sinergisitas antar para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata
3. Melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif bidang kebudayaan dan pariwisata.
4. Penerapan standarisasi dan sertifikasi pelaku dan produk budaya dan pariwisata

Sesuai dengan Renstra 2012-2017, program dan kegiatan utama yang telah dijabarkan untuk tahun 2014 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Pengembangan Nilai Budaya
- f. Pengelolaan Kekayaan Budaya
- g. Pengelolaan Keragaman Budaya
- h. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- i. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- j. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- k. Pengembangan Kemitraan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diperlukan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, rencana kerja dan anggaran, pemantauan dan pengendalian kinerja dan kegiatan, serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja. IKU atau *Key Performance Indicators*

(KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana suatu instansi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah serangkaian tujuan yang terukur yang telah ditetapkan dan dianggap penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata khususnya di lingkungan Pemerintah Aceh. Berikut adalah beberapa indikator yang menjadi IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh:

Tabel 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|----|---|--|------------|
| 1 | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya Aceh, kearifan lokal serta Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh | 1 Jumlah grup kesenian yang dibina | 50 Sanggar |
| | | 2 Kesenian tradisional Aceh yang mendapat legalitas Internasional | 1 Jenis |
| | | 3 Terlestarnya benda cagar budaya Aceh | 194 jenis |
| 2 | Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PRDB Aceh | 1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persentase kenaikan) | 16,67 % |
| 3 | Terwujudnya Aceh sebagai destinasi wisata utama | 1 Jumlah obyek dan daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan | 5 objek |
| | | 2 Persentase peningkatan arus kunjungan wisatawan | 20 % |

E. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang pertanian tanaman pangan Provinsi Aceh.

Penetapan Kinerja 2014 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 yang telah ditetapkan. Target kinerja dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 telah

mengalami perubahan pada indikator serta nilai target bila dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013.

Perubahan mendasar terjadi terutama pada beberapa indikator kinerja yang telah bergeser ke pada tahap lanjut. Salah satunya adalah indikator kinerja yang berkaitan dengan sanggar seni, dimana pada tahun 2013 indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah sanggar seni, yang mana sifatnya lebih kepada pendataan jumlah sanggar seni dan program-program yang mendorong tumbuhnya sanggar-sanggar baru tanpa target pencapaian yang tetap, sedangkan pada tahun 2014 telah ditetapkan indikator kinerja peningkatan jumlah sanggar seni yang dibina yaitu sebanyak 50 sanggar seni.

Demikian pula dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan benda cagar budaya (BCB), jika pada tahun 2013 hanya berkaitan dengan inventarisasi jumlah BCB di Aceh tanpa target yang tertentu, pada tahun 2014 telah ditetapkan sejumlah 194 BCB yang terlestarikan sebagai indikator kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis I dalam RKT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Indikator kinerja pada Sasaran Strategis II yaitu pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ditargetnya tumbuh 20% pada tahun 2014 yang berarti disesuaikan dengan target pertumbuhan jumlah wisatawan pada RPJM.

Indikator kinerja baru yang pada tahun 2013 belum muncul adalah jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dikembangkan dengan target sebanyak 5 objek pada tahun 2014. Secara keseluruhan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dapat dilihat pada tabel 2.1.

Dari dua sasaran/target kinerja yang telah dirumuskan pada tahun 2014, tertuang kedalam 7 program utama yaitu;

(1) Program Pengembangan Nilai Budaya, (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, (5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, (6) Program Pengembangan Destinasi Wisata dan (7) Program Pengembangan Kemitraan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2014 secara umum terealisasi dengan baik, berikut adalah tabel pengukuran capaian IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh:

Tabel: 3.1
CAPAIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2014 | | Capaian (%) |
|-----|---|---|------------|------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya Aceh, kearifan lokal serta Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh | 1. Jumlah grup kesenian yang dibina | 50 sanggar | 91 sanggar | 182 |
| | | 2. Kesenian tradisional Aceh yang mendapat legalitas Internasional | 1 jenis | 1*) | 100 |
| | | 3. Terlestarnya benda cagar budaya Aceh | 194 jenis | 86 jenis | 43,8 |
| 2. | Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PRDB Aceh | 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persentase kenaikan) | 16,67% | 30% | 176 |
| 3. | Terwujudnya Aceh sebagai destinasi wisata utama | 1. Jumlah obyek dan daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan | 5 objek | 12 objek | 240 |
| | | 2. Persentase peningkatan arus kunjungan wisatawan | 20 % | 27,7% | 166,1 |

Sumber : Statistik Wisatawan 2013, Data BPS Tahun 2014.

*) Penandatanganan piagam pada tahun 2011 diserahkan secara resmi tahun 2014

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Aceh pada tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, serta membandingkan hasil capaian Tahun 2014 dengan Tahun sebelumnya 2013 pada beberapa indikator. Rincian hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 secara umum sasaran-sasaran strategis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah dapat terealisasi dengan baik, bahkan beberapa diantaranya melampaui target yang ditetapkan.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah sasaran-sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta penjabaran pencapaiannya:

◆ Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Aceh, kearifan lokal serta Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh

Sasaran ini dicapai melalui : (1) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah Pagelaran, Pameran Seni se Sumatera (PPSS) dan Pagelaran dan Pameran Seni Temu Taman Budaya se Indonesia (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Pelatihan kesenian bagi guru dan pelatih sanggar (3) Program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ; Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, Pagelaran dan Festival tingkat nasional, Festival seni dan pagelaran budaya serta Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri. (4) Program Pengembangan Kerja sama Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah (5) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Partisipasi museum Aceh diluar dan dalam daerah (6) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan-kegiatan yaitu Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum, Pameran bersama tingkat nasional dan regional, Pameran keliling dan temporer serta Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno (7) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan

kegiatan-kegiatan, Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno , Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, Museum dan peninggalan bawah air, Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi program dan Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meliputi 3 (Tiga) indikator, yaitu; (1) jumlah grup kesenian yang dibina (2) kesenian tradisional aceh yang mendapat legalitas internasional (3) terlestarinya benda cagar budaya aceh. Pencapaian target masing-masing indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target RPJM | | Realisasi | | % Capaian | |
|---|---|-------------|------|-----------|------|-----------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya Aceh, kearifan lokal serta dinul Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh | Jumlah grup kesenian yang dibina | 50 | 50 | 50 | 91 | 0 | 182% |
| | Kesenian tradisional Aceh yang mendapat legalitas internasional | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Terlestarinya Benda Cagar Budaya Aceh | 53 | 58 | 67 | 86 | 126 % | 146% |

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa secara umum target dari indikator kinerja yang ditetapkan pada RPJMA pada tahun 2014 terealisasi diatas 100%. Program kegiatan yang saling mendukung menjadi strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai target-target kinerja pada tahun 2014.

Realisasi pembinaan sanggar pada tahun 2014, telah melampaui target RPJM sampai dengan tahun 2017, dimana target yang ditetapkan adalah 50 sanggar sedangkan realisasinya samapi dengan tahun 2014 sebanyak 91 sanggar. Pembinaan sanggar kesenian diupayakan tidak saja melalui program bantuan fisik berupa alat ataupun bahan modal lainnya akan tetapi meliputi pelatihan bagi para pelatih sanggar serta pagelaran dan pameran kesenian dan pertemuan-pertemuan budaya yang mengikutsertakan sanggar binaan. Salah

satu kegiatan yang paling banyak melibatkan sanggar sebagai upaya pembinaan adalah Pagelaran Taman Ratu Safiatuddin (pagelarana TARASA), dengan melibatkan 23 kabupaten dan kota se Aceh. Kegiatan ini telah mendorong partisipasi dan motivasi sanggar-sanggar di daerah untuk tampil dan berkreasi. Sepanjang tahun 2014 juga telah dilaksanakan Konsolidasi Sanggar Seni dan Reportoar Karya Seni yang melibatkan 15 sanggar, Pelatihan Tari Seudati dan Tari Guel yang melibatkan 14 sanggar, Festival Tk. Nasional dengan membawa 7 sanggar, Pawai Budaya di dalam dan luar negeri yang menyertakan 3 sanggar binaan, Pertemuan dan Pagelaran Seni Taman Budaya Se Indonesia yang melibatkan 2 sanggar, serta Kegiatan Pagelaran Taman Ratu Safiatuddin yang melibatkan 50 sanggar yang berasal dari 23 kabupaten/kota se Aceh.

Penetapan Tari Saman sebagai warisan dunia dilakukan oleh pihak UNESCO semenjak tahun 2011. Hal ini ditandai dengan terbitnya sertifikat Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda pada tanggal 24 November 2011. Penyerahan di lakukan oleh pihak UNESCO kepada Pemerintah Aceh pada tahun 2014 yang diterima langsung oleh Gubernur Aceh (dr. H. Zaini Abdullah) di Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya UNESCO akan mengevaluasi konsistensi Pemerintah Aceh dalam pelestarian dan pembinaan Tari Saman tersebut minimal selama 5 tahun sejak penetapan tersebut, sehingga program/kegiatan yang mendukung, baik di dalam maupun diluar daerah harus senantiasa dimunculkan dan di dukung oleh Pemerintah Aceh.

Upaya pelestarian Benda Cagar Budaya dicapai melalui kegiatan-kegiatan yaitu ; Pemugaran benda-benda arkeologi dan cagar budaya di 8 kabupaten/kota (Banda Aceh, Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Pidie, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan Kab. Bener Meriah) sebanyak 19 situs serta kegiatan pendukung lainnya yaitu kegiatan digitalisasi naskah kuno sebanyak 200 naskah kuno, serta pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum Aceh, yang terdiri dari 10 naskah kuno, 4 buah peralatan emas 4 dan 410 buah koin emas kuno. Realisasi pelestarian situs dan benda cagar budaya pada tahun 2014 telah melampaui target tahun 2014, hal ini dikarenakan kerjasama aktif dengan masyarakat yang memberikan masukan dan usulan tentang situs, cagar budaya yang layak dilestarikan. Beberapa diantaranya dilaksanakan oleh rekanan lokal dan terealisasi dengan optimal. Sedangkan kegiatan pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah berbagai bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi, yang diselenggarakan bagi juru pelihara situs,

pengelola museum dan masyarakat umum dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pemelihara atau pengelola situs dan benda cagar budaya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hal tersebut.

◆ **Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Aceh**

Sasaran ini dicapai melalui (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah – Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu – Pengembangan Cinderamata Khas Daerah (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi (3) Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan-kegiatan – Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata – Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya – Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.

Pencapaian target kinerja tersebut dapat digambarkan oleh tabel berikut :

Tabel 3.3

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target RPJM | | Realisasi | | % Capaian | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Aceh | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 4.603.824.000.000 | 5.168.188.800.000 | 1.875.057.677.399 | 2.432.073.470.076 | 43,54 | 47,06 |

Perhitungan kontribusi PDRB sektor kebudayaan dan pariwisata merupakan akumulasi jumlah wisatawan dikalikan dengan rata-rata length of stay dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, yang bersumber dari data Statistik Pariwisata Kemenparekraf RI dan BPS Tahun 2013 dan 2014. Dimana length of stay wisatawan asing adalah 6,66 hari dengan pengeluaran USD 133,43/hari dan wisatawan nusantara length of stay 3,99 hari dengan pengeluaran Rp. 339.980,00/hari. Berdasarkan data-data tersebut diperoleh nilai kontribusi PDRB sektor budaya dan pariwisata pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.875.057.677.399,00 atau setara dengan 1.82% dari total PDRB Aceh

tahun 2013 yang mencapai 103 triliun rupiah. Pada tahun 2014 seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka kontribusi sektor budaya dan pariwisata naik sebesar 30% menjadi Rp. 2.432.073.470.076,00 setara dengan 1,86% terhadap PDRB Aceh tahun 2014 yaitu 130 triliun rupiah. Target kenaikan yang ditetapkan dalam indikator kinerja adalah 16,7% , sedangkan kenaikan yang dicapai sebesar 30% sehingga berdasarkan target kinerja maka pencapaiannya sebesar 176%. Dibandingkan dengan target RPJM yang menggunakan nilai rupiah, maka kontribusi sektor Kebudayaan dan Pariwisata terhadap PDRB hanya mencapai angka 43,54%.

◆ Terwujudnya Aceh Sebagai Destinasi Wisata Utama

Sasaran ini dicapai melalui (1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah – Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan – Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/ Dunia Usaha – Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata – Pembuatan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata – Promosi Potensi dan Objek Pariwisata – Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan (2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan Kegiatan-kegiatan – Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata –Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di Luar Negeri (3) Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meliputi 2 (dua) indikator, yaitu; (1) jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan, (2) Peningkatan persentase arus kunjungan wisatawan . Pencapaian target masing-masing indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target RPJM | | Realisasi | | % Capaian | |
|---|---|-------------|------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Terwujudnya Aceh sebagai destinasi wisata utama | Jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan | 101 | 106 | 132 | 144 | 130 | 135,8 |
| | Peningkatan persentase arus kunjungan wisatawan | 20 % | 20% | 5,9 % | 27,7 % | 29.5 | 138,5 |

Indikator kinerja 1, yaitu jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan, ditargetkan sebanyak 5 obyek per tahun, dengan capaian yang diharapkan pada akhir tahun RPJM sebanyak 120 lokasi. Pada tahun 2013 dilaksanakan 31 paket di 14 kabupaten/kota dengan jumlah objek wisata sebanyak 26 objek dan pada tahun 2014 dilaksanakan proyek di 9 kabupaten/kota dengan jumlah obyek wisata sebanyak 12 obyek wisata sehingga realisasi yang telah dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sejak kondisi awal RPJM (tahun 2012) sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 144 lokasi obyek wisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sejak awal menjadikan program/kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung diobyek-obyek pariwisata unggulan sebagai program prioritas untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan. Data Statistik Pariwisata Tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa di seluruh Aceh terdapat lebih dari 250 obyek wisata unggulan. Kondisi ini mengakibatkan perlu dilakukan sentuhan dan penanganan terhadap objek wisata, baik pembangunan, penataan, maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung obyek dimaksud. Rata-rata obyek wisata unggulan yang dijadikan target pengembangan lebih dari 10 lokasi per tahun, sehingga target RPJM yang hanya 5 lokasi pertahun dalam realisasinya selalu terlampaui. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan dan rangsangan bagi daerah untuk mengembangkan kawasan wisata unggulannya.

Indikator kinerja 2, yaitu peningkatan persentase arus kunjungan wisatawan di dalam RPJMA pada tahun 2014 ditargetkan kenaikan persentase jumlah kunjungan wisatawan sebesar 20%. Kondisi di akhir tahun 2014 tercatat persentase kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh mencapai 27,7%. Pencapaian ini sangat kontras

apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2013 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 5,9%. Pencapaian kenaikan kunjungan wisatawan di Provinsi Aceh pada tahun 2014 bukan disebabkan oleh karena investasi pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur sektor pariwisata seperti : pembangunan gedung atau bangunan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata langsung, seperti bangunan hotel dan restoran dan sebagainya. Investasi tersebut tidak dapat dilakukan karena minimnya dan terbatasnya anggaran pemerintah terutama anggaran pembangunan. Pemerintah daerah hanya menganggarkan pembiayaan pada sektor kepariwisataan sebesar Rp. 53.177.413.343 atau berkisar 0,4% dari total APBA Tahun 2014. Walaupun demikian, pemerintah Aceh lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan pendidikan) yang secara tidak langsung memberikan fungsi pendukung kegiatan ekonomi dan juga kegiatan kepariwisataan.

Sebagai antisipasi terhadap keterbatasan anggaran, pemerintah Aceh melakukan strategi lainnya guna meningkatkan persentase kenaikan jumlah wisatawan. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sektor pariwisata. Selanjutnya usaha pemerintah Aceh dalam meningkatkan kunjungan wisatawan adalah dengan melakukan pelaksanaan kegiatan/event internasional seperti; *International Surfing Competitions*, *Travel Indonesia Mart and Exhibition (TIME) 2014* dan *Peringatan 10 Years Tsunami Commemorations*. Kegiatan lainnya yang tak kalah perannya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing maupun nusantara adalah kegiatan Wisata Sepeda, Aceh Gayo Art Summits, Festival Kuliner, Pagelaran Taman Ratu Safiatuddin, Pacuan Kuda Tradisional, Piyasan Pasee, Festival Tari Damping dan Duta Wisata Aceh. Ditambah lagi dengan pelaksanaan dan partisipasi pemerintah Aceh dalam pameran Gebyar Wisata Budaya (GWBN), Aceh Expo, *International Maritim Expo* dan MTQ Internasional. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam persiapannya sudah melibatkan keikutsertaan pihak-pihak terkait, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga sejak awal sudah dapat diprediksi kehadiran orang asing maupun lokal sebagai peserta sekaligus wisatawan dalam kegiatan tersebut. Ini terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan nusantara ke Provinsi Aceh, dengan menaikkan jumlah wisatawan asing/nusantara sebesar

27,70%, atau meningkat dari sejumlah 1.118.178 pada tahun 2013 meningkat menjadi sejumlah 1.428.262 pada tahun 2014.

Untuk itu, strategi dengan memberikan peluang kepada penggiat kepariwisataan dan melakukan beberapa event pariwisata baik skala nasional maupun internasional patut dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Sekaligus memberikan penguatan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan event-event kepariwisataan Aceh sehingga diharapkan kunjungan wisatawan asing maupun nusantara ke Aceh akan meningkat lebih besar lagi, tentunya dengan memperhatikan target-target pencapaian di dalam RPJMA dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara keseluruhan kegiatan yang diembankan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahun anggaran 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dialokasikan anggaran Rp.53.177.413.343,- (Lima puluh tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Dana tersebut bersumber dari 3 (tiga) sumber pembiayaan/dana yaitu dana konvensional/reguler, Otonomi Khusus, dan Migas. Dana Konvensional/reguler adalah penerimaan Pemerintah Aceh dari pendapatan asli daerah. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh dari dana APBN yang berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun. Dana Minyak dan Gas Bumi adalah penerimaan Pemerintah Aceh dari pembagian hasil minyak dan gas bumi.

Dari sumber dana di atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melaksanakan 11 (sebelas) program/kegiatan yaitu : Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 48.138.570.675,- (90,524%). Adapun realisasi fisik dan keuangan dana APBA tahun 2014 sebesar 97,509 % dan Rp. 5.038.842.668,- (9, 476%) merupakan sisa anggaran.

Dari 11 (sebelas) program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, terdapat 7 (tujuh) program utama yang menjadi sarana dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Ketujuh program tersebut adalah Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan dengan jumlah pagu dana sebesar Rp 26.878.556.540,- atau setara dengan 50,5% dari total pagu dinas secara keseluruhan. Realisasinya dalam kegiatan sebesar Rp. 23.232.551.412,- (86,43%).

Lebih jauh lagi, pagu kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 24.971.212.500,- atau setara dengan 46,9% dari total pagu keseluruhan, dan telah direalisasikan sebesar Rp. 21.480.194.791,- (86 %) .

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebesar Rp.53.177.413.343,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.138.570.675,- (90,52%) dan realisasi fisik 97,509%.
2. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk sasaran strategis kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp. 24.971.212.500,- atau setara dengan 46,9% dari total anggaran dinas, dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 21.480.194.791,- (86 %).
3. Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2014 dijabarkan menjadi 6 indikator kinerja, dengan realisasi sebagai berikut;
 - Indikator kinerja Pembinaan grup kesenian, Legalitas internasional bagi kesenian Aceh, Pengembangan obyek dan daya tarik wisata unggulan dan Peningkatan kunjungan wisatawan dicapai dengan realisasi diatas 100%.
 - Indikator kinerja Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Kontribusi PDRB sektor Pariwisata masing-masing hanya mencapai realisasi sebesar 43,8% dan 47,06%.
4. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan stakeholder budaya dan pariwisata dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran-sasaran strategis dinas.

B. SARAN

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas dimasa mendatang yaitu dengan :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan mutu kualitas data dengan cara melakukan berbagai pelatihan peningkatan SDM serta penggunaan teknologi sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat agar perencanaan dapat tepat sasaran.
3. Berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus peningkatan PDRB sektor Pariwisata harus lebih diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemerintah daerah harus memberikan dukungan untuk terciptanya suasana yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata Aceh.

Akhirnya dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dimasa mendatang.

Banda Aceh, 27 Februari 2015
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA ACEH

DRS. REZA FAHLEVI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740722 199311 1 001